



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, maka Revisi Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dapat selesai disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta antisipasi terhadap kebutuhan pembangunan di masa mendatang.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung ini disusun dengan berdasarkan pada pencapaian visi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung yang berorientasi pada hasil yang sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah Provinsi Lampung di tingkat nasional.

Renstra Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi dari Provinsi Lampung.

Semoga Dokumen Revisi Renstra Balitbangda ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan inovasi daerah dalam mencapai tujuan organisasi.

Bandar Lampung, Maret 2018
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Provinsi Lampung,

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670517 199303 1 011



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	6
2.1. Tugas dan Fungsi Organisasi.....	6
2.1.1 Tugas	6
2.1.2. Fungsi	7
2.1.3. Struktur Organisasi.....	11
2.2. Sumber Daya	13
2.2.1 Kepegawaian	13
2.2.2. Anggaran	15
2.2.3. Sarana Pendidikan	16
2.3. Kinerja Pelayanan.....	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda Provinsi Lampung	21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	22
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	22
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Prov. Lampung.....	26
3.2.1. Visi	26
3.2.2. Misi	26
3.3. Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	27
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	28
4.1. Tujuan dan Sasaran	28
4.2. Strategi dan Kebijakan	31



BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	33
BAB VI	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	40
BAB VII	PENUTUP	43



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan dalam suatu kegiatan adalah pondasi penting sebagai acuan dalam upaya mencapai tujuan. Hal ini juga berlaku dalam merencanakan kegiatan pada Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya, bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Selain itu kewajiban perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis untuk jangka waktu lima tahunan, telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat (2). Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3). Selanjutnya penyusunan rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4); Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 diatas, Renstra-OPD memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Balitbangda merupakan penjabaran rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tantangan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan inovasi yang diemban oleh Balitbangda



Provinsi Lampung adalah memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah dalam seluruh aspek, antara lain; Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Pemerintahan; Ekonomi Pembangunan; Sosial Budaya dan Kemasyarakatan; serta Sumberdaya Alam.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, adalah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbangda Provinsi Lampung.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai perumusan kebijakan pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian.

Tujuan penyusunan renstra Balitbangda adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan pelaksanaan program pembangunan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Lampung.
2. Merumuskan target kinerja sebagai dukungan pencapaian target RPJMD 2015-2019.



3. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Pengukuran Akuntabilitas Kinerja, baik tahunan maupun lima tahunan Balitbangda Provinsi Lampung.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Metode Penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Lampung;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda Provinsi Lampung;

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbangda, Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Isu-isu Strategis;

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang;

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 TUGAS

Balitbangda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Balitbangda, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten/Kota.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.



Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Bidang Penguatan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2.1.2 FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Balitbangda Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan dan anggaran kelitbangan;
2. Pelaksanaan kelitbangan pemerintah provinsi ;
3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
5. Pembangunan sinergitas, koordinasi dan kejasama dengan lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
6. Pelaksanaan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbangan;
7. Pengpublikasian hasil-hasil kelitbangan kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal penelitian, bulletin, dan pusat informasi kelitbangan;
8. Pelaksanaan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di provinsi;
9. Penguatan revitalisasi kelembagaan kelitbangan serta penguatan kapasitas peneliti di daerah;
10. Pelaksanaan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi serta edukasi pelaksanaan kelitbangan daerah;
11. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
12. Meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing di daerah;



13. Perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan inovasi dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
14. Pelaksanaan administrasi kelitbangan dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian hasil penelitian dan pengembangan pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan inovasi daerah;
2. Perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur;
3. Penguatan revitalisasi kelembagaan kelitbangan serta peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti di daerah;
4. Pelaksanaan pembangunan sinergitas, koordinasi dan kejasama dengan lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
5. Menyiapkan data kelitbangan;
6. Pelaksanaan dokumentasi, diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal penelitian, bulletin, website atau pusat informasi kelitbangan;
7. Melaksanakan tugas kesekretariatan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerjasama kelitbangan;
2. Mengelola administrasi dan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Mengelola ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;



4. Mengelola administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
5. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
6. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
4. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
5. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuna dan Teknologi;



2. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Penyiapan bahan, strategi dan penerapan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Penyiapan bahan publikasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
7. Penyiapan bahan pengelolaan hasil-hasil riset dalam daerah;
8. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Penguatan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan, strategi, dan penerapan pengembangan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
4. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait, jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
6. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

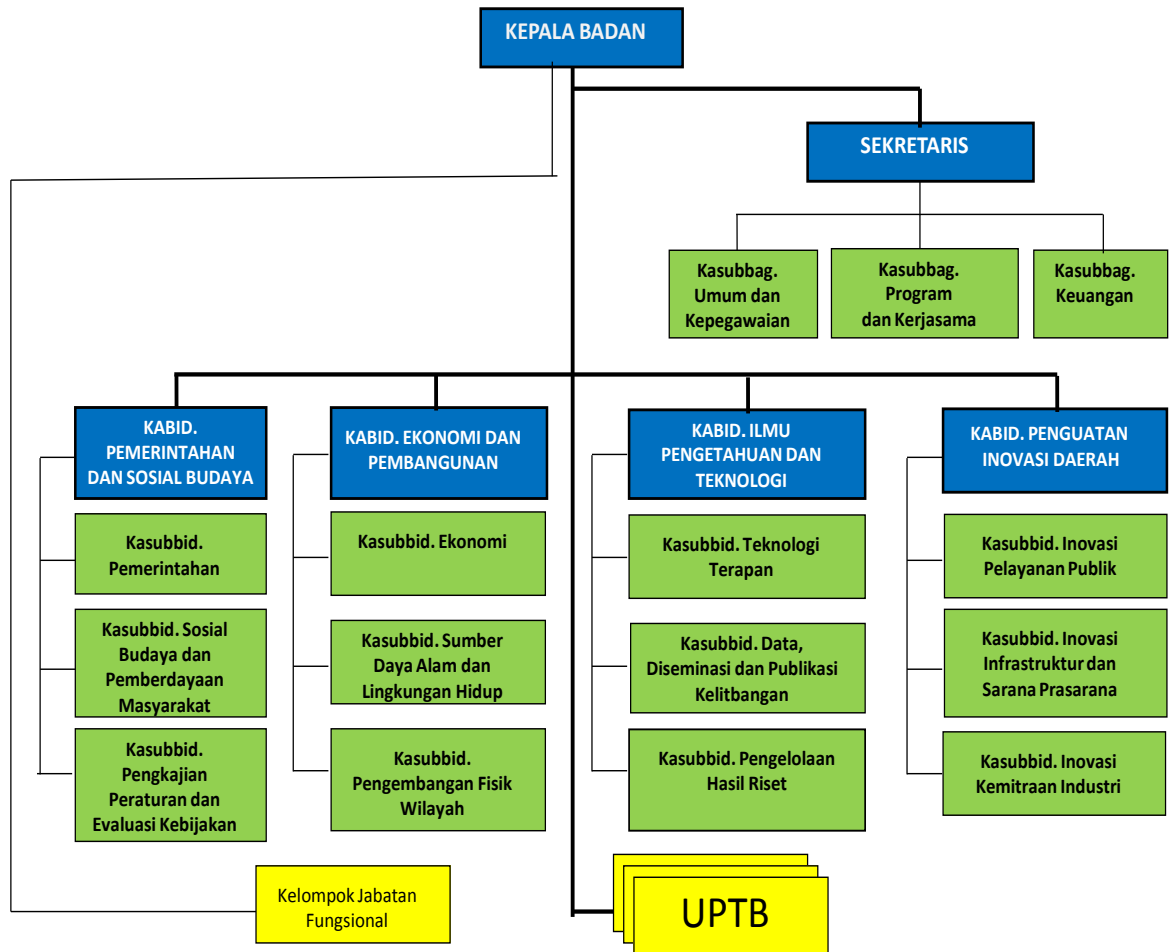
2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN JUMLAH PERSONIL

➤ **Struktur Organisasi Balitbangda**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung,



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Susunan Organisasi Balitbangda, terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Program dan Kerjasama.
- c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3) Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan.
- d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Ekonomi;



- 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Fisik Wilayah.
- e. Bidang Ilmu Penegetahuan dan Teknologi, membawahi:
- 1) Sub Bidang Teknologi Terapan;
 - 2) Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan; dan
 - 3) Sub Bidang Peneglolaan Hasil Riset.
- f. Bidang Penguatan Inovasi Daerah, membawahi:
- 1) Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - 2) Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana; dan
 - 3) Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung berkoordinasi dan dibantu oleh Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor : G/126/II.04/HK/2015 beserta Dewan Riset Daerah.
- Telah ada 2 orang Pejabat Fungsional Peneliti serta 1 orang calon Pejabat Fungsional yang telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Peneliti tahun 2016. Pada tahun 2017 dan melalui LIPI & Kemendagri sedang dalam proses pengajuan 3 (tiga) orang PNS Balitbangda untuk menjadi Pejabat Fungsional Peneliti.

2.2. SUMBER DAYA

2.2.1. Kepegawaian

Sumberdaya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 93 Tahun 2016 Bagan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung terdiri dari 21 Jabatan Struktural, yaitu :



- a. Satu orang Kepala, eselon II a
- b. Satu orang Sekretaris, eselon III a
- c. Empat orang Kepala Bidang, eselon III a
- d. Lima Belas orang Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang, eselon IV a

Berikut adalah data pegawai Balitbangda Provinsi Lampung:

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Balitbangda berdasarkan Jenjang Pendidikan

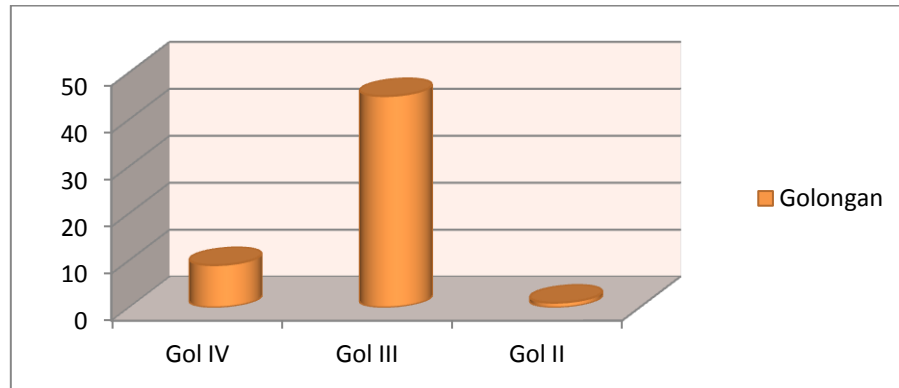
No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S 3	3
2	S 2	21
3	S 1	45
4	Diploma III	1
5	SMA	5
	JUMLAH	75

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur Balitbangda berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV/c	2
2	IV/b	7
3	IV/a	7
4	III/d	23
5	III/c	9
6	III/b	22
7	III/a	5
8	II/d	1
9	II/b	2
	JUMLAH	75



Grafik 1.
Sumber Daya Aparatur Balitbangda berdasarkan Golongan



Berdasarkan jenjang kepangkatan, proporsi terbesar pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung berada pada golongan III, sehingga sebagian besar pegawai berada pada level *middle management*. Distribusi pegawai dengan pola ini menyebabkan tidak terjadinya bentuk ideal dalam piramida manajemen pegawai. Akibat dari bentuk piramida manajemen pegawai yang menggelembung di tengah adalah bahwa staf dengan level *middle management* akan menanggung beban kerja yang merupakan tugas dari *top management*, dan pada saat yang sama juga harus melaksanakan tugas untuk kegiatan yang bersifat *lower management*. Tekanan dan beban kerja dari atas dan bawah ini akan mengakibatkan kinerja pada level *middle management* menjadi tidak optimal. Dengan kondisi ini, maka ke depan perlu dilakukan restrukturisasi pegawai sehingga dapat mengarah untuk mendekati bentuk piramida.

Aspek lain dari sumberdaya Aparatur adalah berkaitan dengan kualitas, baik dalam pengertian *skill* individu maupun dalam pengertian tingkat pendidikan. Secara umum staf Balitbangda Provinsi Lampung telah memiliki kualitas baik, namun sebagai sebuah institusi peneliti, belum memiliki pejabat fungsional peneliti. Dengan demikian ke depan masih sangat relevan untuk merekrut pejabat fungsional peneliti dan menugaskannya dalam diklat fungsional.



2.2.2. Anggaran

Dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balitbangda memperoleh anggaran sebagai berikut: APBD murni 2015 sebesar Rp. 3,099 Milyar. Kemudian mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.4,5 Milyar pada APBD- Perubahan, sehingga total APBD Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.7,599 Milyar. Dan APBD murni pada tahun 2016 Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung adalah sebesar Rp.6 Milyar Kemudian berubah pada APBD- Perubahan menjadi Rp.5,56 Milyar.

Tabel 2.3 berikut memperlihatkan alokasi anggaran tahun 2015 dan 2016 beserta besaran serapan anggaran.

Tabel 2.3

Alokasi Anggaran Tahun 2015 dan 2016 beserta Serapan Anggaran

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket.
2015	Belanja Tidak Langsung	Rp. 0,-	Rp.0,-	0	
	Belanja Langsung	Rp. 7.600.000.000,-	Rp. 7.154.717.001,-	94,14%	
	Total Belanja	Rp. 7.600.000.000,-	Rp. 7.154.717.001,-	94,14%	
2016	Belanja Tidak Langsung	Rp. 5.264.000.000,-	Rp. 5.235.071.732,-	99,045%	
	Belanja Langsung	Rp. 5.560.000.000,-	Rp. 5.359.799.465,-	96,40%	
	Total Belanja	Rp.10.824.000.000,-	Rp.10.594.871.197,-	97,88%	

Alokasi dana Balitbangda digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat penelitian, kajian dan inovasi. Lokasi pelaksanaan kegiatan berada di Provinsi Lampung dengan output berupa Dokumen Kajian / Review sebagai bahan Rekomendasi Kebijakan kepada Gubernur Lampung dan Pendampingan pelaksanaan Kegiatan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.2.3. SARANA PENDUKUNG

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Balitbangda Provinsi Lampung dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung meliputi :

- a) 2 Buah Gedung : - 1 Gedung 2 lantai



- 1 Gedung 1 lantai yang representatif
- b) Ruang rapat yang representatif 1 ruang (kapasitas 50 Orang- 75 orang)
- c) Alat-alat angkutan yaitu: 2 unit kendaraan roda 4
- d) Mebeler sebanyak 6 unit
- e) Laptop sebanyak 2 unit
- f) Note Book sebanyak 7 unit
- g) Komputer PC sebanyak 8 unit

2.3. KINERJA PELAYANAN

Balitbangda Provinsi Lampung merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung. Mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan penelitian dan pengembangan inovasi daerah.

Sesuai dengan sasaran kinerja Balitbangda Provinsi Lampung, kinerja pelayanan yang telah dicapai oleh Balitbangda Provinsi Lampung selama tahun 2015-2016 disajikan dalam tabel berikut:



Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Lampung seperti yang terlihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4. Target capaian kinerja sesuai indikator kinerja selama tahun 2015 – 2016

Evaluasi Capaian Kinerja Renstra dan Realisasi Tahun 2015-2016 Balitbangda Provinsi Lampung

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016	TOTAL REALISASI S/D 2016	Capaian
1	2		3	4	5	6	7
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif	40 policy paper	9 policy paper	9 policy paper	18 policy paper	45 %
		Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordianasi Roadmap SIDA	15 Kabupaten / Kota	5 Kabupaten / Kota	3 Kabupaten / Kota	8 Kabupaten / Kota	53.33%
		Jumlah kerjasama dengan lembaga litbang, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbang	30 buah Kerjasama	7 buah Kerjasama	3 buah Kerjasama	10 buah Kerjasama	33,3%
		Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbangda yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional peneliti	20 orang	2 orang	0 orang	2 orang	10%



Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran dan kegiatan. Berikut gambaran kinerja pelayanan balitbangda Provinsi Lampung sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2015-2016:

- a) Kegiatan Penguatan IPTEK dan Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung. Target keluaran (*output*) berupa lomba inovasi dan iptek tingkat Provinsi. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya adalah Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) yang diikuti peserta dari kategori peneliti, masyarakat umum, dan kategori pelajar/mahasiswa, masing-masing pemenang lomba yaitu juara 1, 2, dan 3 mendapatkan piala dan hadiah berupa insentif pembinaan.
- b) Kegiatan Pembuatan/ Penyusunan Jurnal Inovasi dan Pembangunan Provinsi Lampung. Target keluaran (*output*) berupa penerbitan jurnal inovasi sebanyak 3 kali dalam 1 (satu) tahun. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun melalui Bidang Publikasi dan Informasi Badan Litbangnovda Provinsi Lampung dan hasilnya adalah tersusunnya Buku Jurnal Inovasi dan Pembangunan yang memuat tentang jurnal-jurnal dari mahasiswa, peneliti, ataupun masyarakat umum dengan tema-tema jurnal ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jurnal inovasi yang terkait dengan pembangunan yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat umum di Provinsi Lampung maupun tingkat nasional.
- c) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun melalui Bidang Kajian Sosial Budaya, Pemerintahan dan Kemasyarakatan Badan Litbangnovda Provinsi Lampung dan hasilnya adalah koordinasi dan sinergitas dengan *stakeholder* terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan di Provinsi Lampung melalui sosialisasi dan fasilitasi kegiatan selama setahun.
- d) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Lampung. Hasilnya adalah dengan dikukuhkannya Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Lampung dan maksimalisasi peran DRD yang didukung oleh kajian untuk kemajuan kelitbang dan pembangunan Provinsi Lampung.
- e) Kegiatan Kajian Pengembangan Transformasi Budaya Lampung. Target keluaran (*output*) berupa Dokumen Kajian Pengembangan Transformasi Budaya Lampung sebanyak 1 (satu) buah. Kegiatan ini merupakan kegiatan



rutin yang dilaksanakan setiap tahun melalui Bidang Kajian Sosial Budaya, Pemerintahan dan Kemasyarakatan Badan Litbangnovda Provinsi Lampung dan hasilnya adalah rumusan kebijakan dalam lingkup pelestarian dan pengembangan budaya Lampung yang dimuat dalam Buku Kajian Transformasi Budaya Lampung dan tersosialisasinya kegiatan transformasi budaya Lampung kepada masyarakat umum.

- f) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Publikasi dan Informasi Badan Litbangnovda Provinsi Lampung, hasil kegiatan ini adalah tersedianya buku-buku perpustakaan sebagai referensi untuk kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan di Badan Litbangnovda Provinsi Lampung.
- g) Kegiatan Pembuatan *Website*. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Publikasi dan Informasi Badan Litbangnovda Provinsi Lampung, hasil kegiatan ini adalah terbangunnya *Website* Balitbangnovda Provinsi Lampung dalam mendukung Iptek dan Inovasi Daerah.
- h) Kegiatan Fasilitasi Rencana Pembangunan *Technopark* dan *Sciencepark* di Provinsi Lampung. Target keluaran (*output*) berupa 1 (satu) buah Dokumen Fasilitasi Rencana Pembangunan *Technopark* dan *Sciencepark* di Provinsi Lampung.
- i) Kegiatan Fasilitasi Ruang Pelajar, Mahasiswa dan Kelompok Studi. Adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengakomodir hasil-hasil inovasi dari pelajar, mahasiswa, dan kelompok studi yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai rekomendasi bahan kajian selanjutnya.
- j) Kegiatan Fasilitasi dan Informasi Kelitbangan. Adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Bidang Kajian Sosial Budaya, Pemerintahan dan Kemasyarakatan Badan Litbang Provinsi Lampung dan hasilnya adalah koordinasi dan sinergitas dengan stakeholder terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan di Provinsi Lampung melalui sosialisasi dan fasilitasi kegiatan selama setahun.
- k) Kegiatan Revisi Masterplan Pengembangan Bandara Provinsi Lampung dari Hasil Kajian Spasial. Target keluaran (*output*) dari kegiatan ini berupa Dokumen Rencana Induk Pengembangan Bandar Udara Masa Depan Lampung. Kegiatan ini adalah kegiatan yang berada pada bidang kajian IPTEK dan Inovasi.



- l) Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Operasional Tenaga Ahli Provinsi Lampung. Kegiatan ini memfasilitasi dan mengkoordinasikan antara tenaga ahli dengan SKPD/ Instansi terkait.
- m) Kegiatan Kajian Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mesuji dalam rangka Peningkatan Keunggulan Komparasi Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Produktivitas Daerah. Target keluaran (output) berupa Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Pesisir. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan pada bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama.
- n) Kegiatan Pengembangan Peternakan Ayam Probiotik dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Pendapatan Masyarakat. Target keluaran (output) dari kegiatan ini adalah Dokumen Kajian Strategi Percepatan Ayam Probiotik di Provinsi Lampung. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun dokumen yang mendeskripsikan strategi percepatan pengembangan strategi percepatan pengembangan Ayam Probiotik di Provinsi Lampung.
- o) Kegiatan Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam rangka Mendukung Poros Destinasi Utama Pariwisata di Provinsi Lampung.
- p) Kegiatan Analisis Ekonomi dan Produksi Beras Siger dalam rangka Penguatan Program Ketahanan Pangan.
- q) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tata Ruang. Target keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen penyusunan pra-desain ruang terbuka hijau (RTH) Pahoman, Kota Bandar Lampung.
- r) Kegiatan Kajian Bidang Transportasi, Energi dan Infrastruktur. Target keluaran berupa Dokumen Kajian Sistem Jaringan Transformasi Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Pesisir Provinsi Lampung.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda Provinsi Lampung

Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Balitbangda Provinsi Lampung :

1. Tantangan
 - a. Persepsi terhadap manfaat penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang diharapkan.



- b. Komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai pilar terdepan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
 - c. Kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan.
 - d. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, sementara secara kelembagaan belum tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
2. Peluang
- a. Dukungan dari Pemerintah Provinsi dalam bentuk pengalokasian anggaran melalui APBD.
 - b. Sebagai koordinator penelitian dan pengembangan akan mempermudah kerjasama, baik di daerah, antarprovinsi maupun dengan pusat.
 - c. Adanya Dewan Riset Daerah, dan Tenaga Ahli sangat menunjang dalam mendukung penelitian dan pengembangan di daerah;
 - d. Adanya kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan dengan Perguruan Tinggi setempat, dan sejumlah lembaga penelitian dan pengembangan di tingkat Pusat.;
 - e. Penerapan otonomi daerah dan era globalisasi yang menuntut diperlukannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah.
 - f. Kesadaran perlunya litbang dalam menentukan kebijakan daerah dan dalam pengembangan potensi daerah.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Lampung, peranan Balitbangda sangat penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, agar berjalan dengan baik maka perlu didukung sumber daya yang baik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut di atas terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu :

A. Faktor Eksternal

1. Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam penelitian dan pengembangan inovasi daerah, hal ini terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih/overlap, sehingga diperlukan adanya revisi dan evaluasi terhadap suatu kegiatan.
2. Belum diimplementasikannya hasil-hasil penelitian/kajian serta kerjasama kegiatan kelitbang dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta.
3. Kurang dimanfaatkannya sistem informasi (*website*), penggunaan teknologi tersebut secara optimal memberikan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Balitbangda Provinsi Lampung



B. Faktor Internal

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelitbang secara optimal masih belum didukung sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur;
2. Tenaga fungsional peneliti masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balitbangda dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerah;
3. Sumberdaya aparatur yang belum memadai secara kompetensi, sehingga Kajian Kelitbang masih belum mengalami kemajuan yang signifikan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Dalam rangka pelaksanaan penelitian potensi daerah, masih belum didukung dengan dokumen yang secara administratif merupakan prasyarat sebelum melaksanakan kelitbang seperti diantaranya *Idea Concept Paper (ICP)*; *Term of Reference (TOR)*; *Proposal*; *Research Design*; *Finaly Report*.
5. Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
6. Pedoman, data dan informasi pembangunan daerah masih belum lengkap sebagai bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Inovasi daerah;
7. Sistem dan jaringan kelembagaan litbang inovasi daerah belum tersusun dan diperkuat secara regulasi;



8. Pelaksanaan penelitian di daerah masih belum dikoordinasikan secara tepat dan terarah dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Lampung.



Tabel 3.1
Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbangda Provinsi Lampung

ASPEK KAJIAN	KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN BALITBANGDA
		INTERNAL	EKSTERNAL	
<p>Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penggunaan data penelitian dalam proses penyusunan kebijakan. - Masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung kelitbang. - Belum optimalnya distribusi data bahan masukan penyusunan laporan hasil penelitian/kajian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi dalam penelitian dan pengembangan, hal ini terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih, sehingga diperlukan revisi terhadap suatu kegiatan. - Kurang dimanfaatkannya sistem informasi (<i>Website</i>), padahal penggunaan teknologi tersebut secara optimal memberikan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Balitbangda Provinsi Lampung. 	<p>Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah, sehingga konsep penelitian dan pengembangan harus berubah serta menyesuaikan dengan keadaan dan tuntutan kebutuhan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya peran Balitbangda sesuai dengan tupoksinya. - Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama baik antar daerah, dan dengan pihak perguruan tinggi dan swasta serta masyarakat. - Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (internet) dan data digital yang telah dan sedang dikembangkan. - Belum optimalnya distribusi data bahan masukan penyusunan laporan hasil penelitian/kajian. - Kurangnya tenaga fungsional peneliti.



3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM PROVINSI LAMPUNG

3.2.1. Visi

Berdasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 serta visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 adalah:

“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019”

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. *Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.*
2. *Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.*
3. *Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.*
4. *Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.*
5. *Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.*

Dari kelima Misi tersebut, tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Lampung terkait pada Misi ketiga, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran. Misi ini memberikan arahan tentang upaya



pencapaian Visi Lampung Maju dan Sejahtera melakukan pengembangan IPTEK dan Inovasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui pengembangan IPTEK dan inovasi diharapkan mampu membuat terobosan pelaksanaan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Lampung, Balitbangda Provinsi Lampung sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta mengkoordinasikan dalam mendukung semua Misi Gubernur Lampung.

2.3. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan kajian atas permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Balitbangda Provinsi Lampung dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, serta telaahan Visi, Misi, dan Program Provinsi Lampung, maka berikut isu-isu strategis Balitbangda Provinsi Lampung:

1. Belum optimalnya peranan Balitbangda Provinsi Lampung dalam memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan pembangunan;
2. Belum termanfaatkan secara optimal hasil-hasil kajian dan pengembangan inovasi oleh OPD lain dalam upaya percepatan pencapaian target untuk pembangunan.



BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rumusan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, bahwa misi yang diemban oleh Balitbangda Provinsi Lampung adalah misi III yaitu : “Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Iptek dan Inovasi, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Beragama”. Balitbangda hadir menjadi lembaga Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Daerah berbasis Riset, Iptek dan Inovasi dengan sasaran dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Input/masukan yang dapat dihasilkan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berupa kajian kebijakan pemerintahan daerah yang berbasis Riset, Iptek dan Inovasi dan dapat dimanfaatkan baik oleh OPD maupun lembaga penelitian, Perguruan Tinggi dan stakeholders terkait. Target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung jumlah kajian yang dimanfaatkan sebanyak 9 kajian (22.5%) pada tahun 2015, 18 Kajian (45 %) pada tahun 2016, 28 Kajian (70 %) pada tahun 2017, 35 kajian (87.5%) tahun 2018 dan 100 % pada tahun 2019 dengan jumlah kajian yang dimanfaatkan sebanyak 40 Kajian.



Tabel 4.1
Tabel Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Balitbangda Provinsi Lampung

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah yang berbasis riset, IPTEK dan inovasi	Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	<p>Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif</p> <p>Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDA</p> <p>Jumlah kerjasama dengan lembaga litbang, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan</p> <p>Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbangda yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional peneliti</p>



Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbangda Provinsi Lampung 2015-2019

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah yang berbasis riset, IPTEK dan inovasi	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK, dan Inovasi	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif	9	18	28	35	40
				Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDA	4	7	10	13	15
				Jumlah kerjasama dengan lembaga litbang, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbang	6	12	18	24	30
				Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbangda yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional peneliti	4	8	12	16	20



4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang tersedia. Strategi tersebut meliputi:

1. Menata sistem penentuan topik dan yang akan dilaksanakan guna menentukan kajian ilmiah serta sosialisasi prioritas secara lebih selektif.
2. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait penumbuhkembangan jejaring kerjasama dan koordinasi terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (*problem solving*) melalui pemanfaatan hasil-hasil kajian.
3. Mengusulkan penambahan kuantitas tenaga fungsional peneliti.

Untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan menggunakan strategi yang ditetapkan maka kebijakan pokok yang diambil oleh Balitbangda Provinsi Lampung selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah:

1. Melaksanakan kegiatan Litbang yang berkaitan dengan isu-isu aktual program strategis Pemerintah Daerah.
2. Membangun jejaring kerjasama kelembagaan dengan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan sinergi dalam kegiatan Litbang.
3. Meningkatkan kapasitas tenaga fungsional peneliti dan pejabat struktural dalam rangka mendukung kegiatan Litbang di daerah.



Tabel 4.3.
Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Balitbangda Provinsi Lampung

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah yang berbasis riset, IPTEK dan inovasi yang dimanfaatkan	1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah 2. Mendorong dan menumbuhkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam mendukung daya saing dan kemandirian daerah 3. Mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Litbang, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan 4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia kelitbangan	1. Menata sistem penentuan topik dan yang akan dilaksanakan guna menentukan kajian ilmiah serta sosialisasi prioritas secara lebih selektif 2. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait penumbuhkembangan jejaring kerjasama dan koordinasi terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (<i>problem solving</i>) melalui pemanfaatan hasil-hasil kajian. 3. Mengusulkan penambahan kuantitas tenaga fungsional peneliti	1. Melaksanakan kegiatan Litbang yang berkaitan dengan isu-isu aktual program strategis Pemerintah Daerah. 2. Membangun jejaring kerjasama kelembagaan dengan <i>stakeholders</i> terkait untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan sinergi dalam kegiatan Litbang. 3. Meningkatkan kapasitas tenaga fungsional peneliti dan pejabat struktural dalam rangka mendukung kegiatan Litbang di daerah.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran OPD. Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 yang berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan daerah dan sesuai tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung.

Kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolak ukur dan memiliki kinerja yang dilaksanakan setiap tahunnya. Program-program yang akan dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Lampung dalam kurun waktu Tahun 2015 s.d. 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan.
7. Program Penelitian dan Pengembangan.



Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan bagian program Balitbangnovda Provinsi Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

NO.	KEGIATAN
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor
4	Penyediaan alat tulis kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9	Penyediaan makanan dan minuman
10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
12	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
13	Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD
14	Penyediaan <i>Extrafooding</i>
15	Penyediaan jasa surat menyurat
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional
17	Penataan dan Pemeliharaan Dokumen dan Informasi Kepegawaian

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO.	KEGIATAN
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2	Pengadaan peralatan gedung kantor
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

III. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

NO.	KEGIATAN
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
3	Pelaksanaan <i>outbond</i> bagi aparatur



IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

NO.	KEGIATAN
1	Pendidikan dan pelatihan formal

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

NO.	KEGIATAN
1	Penyusunan Laporan Keuangan
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3	Penyusunan PPAS dan RKA
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan

NO.	KEGIATAN
1	Rapat koordinasi dan konsultasi Perencanaan
2	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2016
3	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2015
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan BALITBANGNOVDA Provinsi Lampung
5	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Kelitbangan Balitbangnovda

VII. Program Penelitian dan Pengembangan

NO.	KEGIATAN
1	Penguatan IPTEK dan anugerah inovasi daerah Provinsi Lampung
2	Pembuatan/penyusunan Jurnal Inovasi dan pembangunan Provinsi Lampung
3	Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung
4	Fasilitasi dan Koordinasi Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung
5	Kajian Pengembangan Transformasi Budaya Lampung
6	Kajian Pengembangan Industri Komoditas Hilir Kakao dan Kopi
7	Penyusunan Inventarisasi Plasma Nutfah/ Sumber Daya Genetik Provinsi Lampung
8	Pengelolaan perpustakaan
9	Penguatan jaringan penelitian (Jarlit) pendidikan Provinsi Lampung



10	Pembuatan <i>website</i>
11	Penyusunan <i>database</i> Litbang
12	Pembuatan <i>e-library</i> dan sistem <i>jurnal on line (Open Journal System)</i>
13	Pengembangan Sistem Informasi <i>Database</i>
14	Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)
15	Kajian Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Sekolah Menengah (SMA/SMK) (Implementasi UU No. 23 Tahun 2014)
16	Analisis Spasial Strategi Pengembangan Bandara Di Prov. Lampung
17	Fasilitasi Rencana Pembangunan Technopark dan Science Park di Prov. Lampung
18	Kajian Penataan Pengembangan Poros ITERA, IAIN, Kota Baru terkait dampak pembangunan jalan tol trans sumatera
19	Kajian Pemetaan Potensi Laut dan Kawasan Pesisir dalam rangka pemetaan kawasan laut dan pesisir mendukung Lampung sebagai bagian poros maritim Indonesia
20	Kajian Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Kawasan Industri Strategis Lampung (Lintas Pantai Timur)
21	Kajian Lahan pengganti kawasan industri Way Pisang Lampung Selatan
22	Kajian Strategis Percepatan Pengembangan Kambing Saburai di Provinsi Lampung
23	Pengembangan Laboratorium Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (<i>Champion Innovation</i>)
24	Penyusunan <i>Grand Design</i> dan <i>Roadmap</i> Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah
25	Penyusunan Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil-hasil Inovasi Daerah
26	Fasilitasi Penelitian dan Pengkajian Dalam Penyusunan Kertas Kerja Kebijakan (<i>policy paper</i>)
27	Fasilitasi Ruang Pelajar, Mahasiswa dan Kelompok Studi
28	Fasilitasi dan Informasi Kelitbangan
29	Pembuatan/Penyusunan Majalah Kelitbangan
30	Penelitian Model Input-Output Provinsi Lampung
31	Revisi Masterplan Pengembangan Bandara Provinsi Lampung dari hasil kajian spasial
32	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2016-2020
33	Fasilitasi Lomba Iptek dan Inovasi Tingkat Nasional
34	Updating Roadmap SIDA Lampung
35	Hibah Riset
36	Pemberdayaan Desa Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)
37	Inkubasi Riset Berdaya Jual



38	Kajian Pengembangan Komoditas Tanaman Unggulan Ubi Kayu Untuk Menghasilkan Inovasi Produksi Pangan Dalam Pengembangan Teknologi Pertanian Mendukung Rencana Aksi Teknopark Ubi Kayu
39	Lampung Idea dan Regional Planning Gallery
40	Studi Spasial Optimalisasi Kepelabuhanan Laut dan Penyebrangan Provinsi Lampung dalam Mendukung Sistem Logistik
41	Analisis Optimalisasi Program Bina Lingkungan di Bidang Pendidikan
42	Analisis Optimalisasi Pangan Lokal dalam Meningkatkan Gizi dan Kesehatan Siswa Sekolah di Provinsi Lampung
43	Strategi Peningkatan Mutu Guru Muatan Lokal Bahasa Lampung di Provinsi Lampung
44	Kajian Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Benda Cagar Budaya
45	Pemetaan Dialektologi dan Persebaran Bahasa Lampung
46	Analisis Strategi Daya Saing Provinsi Lampung dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
47	Pengelolaan Administrasi dan Operasional Tenaga Ahli Provinsi Lampung
48	Hilirisasi dan Industrialisasi Rumput Laut
49	Kajian Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mesuji dalam Rangka Peningkatan Keunggulan Komparasi Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Produktivitas Daerah
50	Kajian Pengembangan Sapi Unggul Melalui Pembibitan dan Pembentukan Kawasan Sentral Produksi Sapi Menuju Swasembada Daging
51	Kajian Perakitan Produk Suplemen Pakan Penggemukan Sapi Potong Rakyat
52	Pengembangan Peternakan Ayam Probiotik dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Pendapatan Masyarakat
53	Kajian Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Masyarakat
54	Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Rangka Mendukung Poros Destinasi Utama Pariwisata Di Provinsi Lampung
55	Optimalisasi Produksi Tanaman Padi Gogo Dalam Sistem Tumpang Sari dengan Ubi Kayu Melalui Aplikasi Dosis Bahan Organik dan Waktu Tanam Yang Tepat
56	Strategi Penguatan Koperasi dan UMKM Melalui Penganekaragaman Produksi Ber-HAKI
57	Analisis Pengentasan Kemiskinan melalui Skema Penguatan Modal UKM dan Bantuan Tunai
58	Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Perluasan Lapangan Usaha dan Kesempatan Kerja
59	Analisis Ekonomi dan Produksi Beras Siger dalam Rangka Penguatan Program Ketahanan Pangan
60	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
61	Penelitian dan Pengembangan Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah
62	Penelitian dan Pengembangan Politik dan Hukum



63	Penelitian dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan (Good and Clean Governance)
64	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan
65	Penelitian dan Pengembangan Keuangan, Aset dan Kerjasama
66	Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya
67	Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Desa
68	Penelitian dan Pengembangan Tata Ruang
69	Penelitian dan Pengembangan Kawasan dan Pariwisata
70	Penelitian dan Pengembangan Bidang Publikasi dan Informasi
71	Kajian Bidang Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan
72	Penelitian dan Pengembangan Usulan Prioritas Kegiatan dari SKPD Lainnya
73	Kajian Bidang Maritim dan Perikanan
74	Kajian Bidang Transportasi, Energi dan Infrastruktur
75	Penyusunan Indikator IPTEK
76	Fasilitasi, Publikasi dan Informasi hasil-hasil penelitian yang aplikatif
77	Kajian Zonasi Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung
78	Rembug/Himpun Pekon Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan (Pendekatan Budaya)
79	Fasilitasi dan koordinasi Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Budaya, IPTEK dan Inovasi, Kerjasama dan Ekonomi serta publikasi Provinsi Lampung
80	Studi Pengembangan Cagar Alam dan Potensi Wisata Provinsi Lampung
81	Analisis Potensi dan Pengelolaan PAD
82	Analisis Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah
83	Pengembangan Riset Daerah
84	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
85	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan
86	Analisis Perumusan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Perekonomian Daerah
87	Kajian Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Terpadu
88	Kajian Arah dan Strategi Pemulihan DAS di Provinsi Lampung
89	Desain Pengembangan Kawasan Pesisir Lampung Berdaya Guna (PELANA)
90	Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Terapan
91	Penelitian dan Pengembangan Bidang Data, Diseminasi, dan Publikasi Kelitbangan
92	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengelolaan Hasil Riset
93	Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi Pelayanan Publik
94	Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi Kemitraan Industri
95	Kajian-kajian Aktual dan Kompetitif
96	Analisis Perumusan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi



97	Analisis Perumusan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Sosial Budaya
98	Analisis Perumusan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penguatan Inovasi Daerah

Rincian program, kegiatan serta indikator disajikan dalam Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
(terlampir)



BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Lampung yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6.1. pada halaman berikut.



Tabel 6.1
Rumusan perhitungan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

No	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target Kinerja pada Tahun ke				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif	Jumlah Rumusan kebijakan (policy paper) per tahun	9	18	28		
		Jumlah Roadmap SIDA Kabupaten/Kota yang telah disinkronkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung	Jumlah Roadmap SIDA Kabupaten/Kota yang telah disinkronkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung	4	7	10		
		Jumlah kerjasama dengan lembaga litbang, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan	Jumlah kerjasama dengan lembaga litbang, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan per tahun	6	12	18		
		Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbangda yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional peneliti	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbangda yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional peneliti per tahun	4	8	12		



Rumusan perhitungan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

No	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target Kinerja pada Tahun ke				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Persentase kajian/policy paper yang dapat dimanfaatkan	(Jumlah Rumusan kebijakan (policy paper) per tahun/ Jumlah Rumusan kebijakan (policy paper) 2015-2019) x 100%				20	20
		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan SIDA	(Jumlah Roadmap SIDA Kabupaten/Kota yang telah disinkronkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung/ Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung) x 100%				20	20



Tabel 6.2
Program, Indikator Program beserta Target Program selama 5 tahun
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

No	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	Target Kinerja pada Tahun ke					Kondisi Akhir
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif	-	9 Rumusan Kebijakan	18 Rumusan Kebijakan	28 Rumusan Kebijakan	35 Rumusan Kebijakan	40 Rumusan Kebijakan	40 Rumusan Kebijakan



BAB VII PENUTUP

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 telah disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbangda Provinsi Lampung menjadi serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk pengembangan kelitbang dan inovasi daerah di masa mendatang.

Renstra Balitbangda Provinsi Lampung ini menjadi acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam jangka waktu Tahun 2015-2019, implementasi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai visi Provinsi Lampung yaitu Lampung Maju dan Sejahtera 2019.

Keberhasilan Balitbangda Provinsi Lampung memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Intansi/Lembaga terkait baik Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota. Semoga Dokumen Renstra Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 ini dapat menjadi sumber data dan informasi untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang agar tercapai kinerja Balitbangda Provinsi Lampung yang lebih baik.